

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS TENAGA KERJA
Jln. Kyai Modjo Kelurahan Wulauwen Telp. 0431-322425
Tondano Utara

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 untuk penanggulangan kemiskinan serta penurunan tingkat pengangguran dengan Pelatihan Tenaga Kerja berbasis kompetensi, perluasan kesempatan kerja serta program perlindungan pekerja yang berdampak pada penurunan Tingkat Pengangguran dan penurunan angka kemiskinan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa melalui program dan kegiatan diarahkan untuk optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJP Pemerintah Kabupaten Minahasa;

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Tondano, Januari 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja,



DRS JORIS TUMILANTOUW
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19681129 199101 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian sasaran strategis 1 “Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka” :
 - Diukur dengan indikator : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja, Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja dan Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program, yakni Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja
 - Target capaian indikator sasaran Program Perencanaan Tenaga Kerja tahun 2024 sebanyak 1 Dokumen untuk RTK Makro, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 100 %. Hal ini disebabkan Keterbatasan anggaran penyusunan.
 - Target capaian indikator sasaran Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja tahun 2024 sebanyak 192 Orang sampai dengan bulan Desember 2024 dari target 200 orang. Terealisasi sebanyak 96 %
 - Target capaian indikator sasaran Program Penempatan Tenaga Kerja tahun 2024 2.000 orang; sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 terealisasi 1.486 orang .Dengan demikian capaian ini tidak mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 74.3 %.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja” :
 - Diukur dengan indikator Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh 1 (satu) Program yaitu Program Hubungan Industrial.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebanyak 20.268 Orang Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 20.199 Orang. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 99.65 %.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebanyak 19,640 Orang terjadi peningkatan sebanyak 559 Orang.
3. Capaian Sasaran Strategis 3 “Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang bersih, Akuntabel dan Profesional”
 - Diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh Program penunjang urusan pemerintah daerah

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Tenaga Kerja ke depan, yaitu sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja yang ditandai dengan kurangnya ketrampilan, kurangnya kompetensi dan kurangnya daya juang/karakter.
2. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka dengan tingkat pendidikan menengah dan tinggi.
3. Terbatasnya kesempatan kerja formal.
4. Kurang memadainya perlindungan norma kerja dan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diperlukan suatu upaya pelaksanaan pembangunan yang menerapkan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

LKjIP dibuat sebagai pertanggung jawaban Instansi Pemerintah selama satu tahun yang mengacu kepada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999.

Dalam rangka itulah pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategik.

Penyusunan LKjIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Minahasa yang bermanfaat antara lain untuk:

1. Mendorong Dinas Tenaga Kerja sebagai salah satu Instansi Pemerintah di Kabupaten Minahasa untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintah dan Pembangunan secara baik dan benar (*God Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan Dinas Tenaga Kerja sebagai salah satu instansi Pemerintah di Kabupaten Minahasa yang akuntabel sehingga pelaksanaan tugas dilakukan secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat serta lingkungannya.
3. Menjadi bahan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Ketenagakerjaan.

Pertanggung jawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka pelaksanaan Inpres tersebut, maka Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengeluarkan Keputusan Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa juga mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai kebutuhan.

Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 62 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 22 Tahun 2016 tanggal 27 Agustus 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa.

1.3 GAMBARAN UMUM

- **Kedudukan**

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang tenaga kerja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa mempunyai struktur organisasi yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 62 Tahun 2016.

- **Tugas**

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang tenaga kerja;
- b. Pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan pembinaan di bidang ketenagakerjaan;
- c. Penyusunan program pengembangan tenaga kerja;
- d. Pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan data dan informasi di bidang ketenagakerjaan;
- e. Pembinaan Sumberdaya Manusia Aparatur di bidang ketenagakerjaan;

- f. Pembinaan dan pelatihan ketenagakerjaan;
- g. Pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
- h. Pembinaan dan penempatan tenaga kerja luar negeri;
- i. Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- j. Pembinaan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja;
- k. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan pengadministrasian umum;
- l. Pelaksanaan Pengawasan, Monitoring dan evaluasi; dan
- m. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.

- **Organisasi**

Gambaran Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris sampai Kepala Bidang yang ada dalam SKPD Dinas Tenaga Kerja Diuraikan sebagai berikut:

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang tenaga kerja;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program Dinas, mengacu pada program Nasional dan Daerah;
- c. Merumuskan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang tenaga kerja;
- e. Menetapkan tata cara dan tata laksana pelayanan di bidang tenaga kerja;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan, dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
- g. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program pada tahun berikutnya;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pengembangan dan pembinaan pegawai, pelayanan administrasi secara vertikal dan horisontal, pelaksanaan ketatausahaan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. *Pemberian pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;*
- b. *Penyusunan program dan rencana kegiatan;*
- c. *Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sub Bagian;*
- d. *Penyelenggaraan urusan umum;*
- e. *Penyelenggaraan urusan perlengkapan;*
- f. *Penyelenggaraan urusan kepegawaian;*
- g. *Penyelenggaraan urusan keuangan;*
- h. *Penyelenggaraan urusan rumah tangga;*
- i. *Penyelenggaraan urusan evaluasi dan pelaporan;*
- j. *Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan*
- k. *Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.*

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan informasi pasar kerja dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas

Bidang Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. *Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja;*
- b. *Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja;*
- c. *Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja;*
- d. *Pengkoordinasian dan fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan;*
- e. *Pelayanan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN);*
- f. *Penerbitan SPP AKL;*

- g. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela;*
- h. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM.*
- i. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya;*
- j. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI;*
- k. Pelaksanaan fasilitasi perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI;*
- l. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI;*
- m. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri;*
- n. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI;*
- o. Pelayanan kepulangan TKI;*
- p. Pelaksanaan evaluasi kegiatan; dan*
- q. Penyusunan dan pelaporan kegiatan.*

Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas melaksanakan hubungan kerja industrial, pembinaan kesejahteraan pekerja, menerbitkan persyaratan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Hubungan Industrial mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan di Daerah;*
- b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh di Daerah;*
- c. Pencatatan PKWT pada perusahaan di Daerah;*
- d. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan;*
- e. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan;*
- f. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di Daerah;*

- g. *Pendaftaran dan seleksi calon hakim adhoc pengadilan hubungan industrial di Daerah;*
- h. *Pelaksanaan bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan;*
- i. *Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum Daerah kepada Gubernur;*
- j. *Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja;*
- k. *Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan;*
- l. *Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial;*
- m. *Pelaksanaan verifikasi keanggotaan SP/SB;*
- n. *Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh dan melaporkannya kepada provinsi.*
- o. *Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan berdasarkan hasil verifikasi.*
- p. *Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
Penyusunan dan pelaporan Kegiatan*

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan produktifitas tenaga kerja, memberikan pembinaan infrastruktur dan peningkatan keterampilan tenaga kerja serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. *Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja;*
- b. *Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas;*
- c. *Pelaksanaan program peningkatan produktivitas;*
- d. *Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis bagi pengelola Lembaga Latihan Kerja;*
- e. *Pelaksanaan metode dan kurikulum pelatihan;*
- f. *Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi peserta latihan;*
- g. *Pelaksanaan evaluasi kegiatan; dan*

h. *Penyusunan dan Pelaporan Kegiatan.*

Balai Latihan Kerja (BLK) yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pelatihan keterampilan sebagai usaha penyediaan tenaga kerja yang produktif, profesional dan mandiri, serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

Dalam melaksanakan tugas UPT Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. *Menyusun dan melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan dibidang industri pertanian, peternakan, tata niaga sesuai kebutuhan pasar kerja;*
- b. *Melaksanakan urusan tata usaha;*
- c. *Melaksanakan kegiatan Pelatihan Institusional dan Non Institusional sesuai jenis kejuruan yang dibutuhkan;*
- d. *Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan.*

• **Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 62 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa terdiri dari 5 (lima) unit Eselon yaitu :

Kepala Dinas (Eselon II B)

- a. Sekretariat Dinas (Eselon III A)
terdiri dari :
 - SubBagian program keuangan dan pelaporan (Eselon IV A)
 - Sub BagianUmum dan Kepegawaian (Eselon IV A)
- b. Bidang Penempatan Tenaga Kerja (Eselon III B), terdiri dari :
 - Seksi Penempatan Tenaga Kerja (Eselon IV A)
 - Seksi Perluasan Kerja (Eselon IV A)
 - Seksi Informasi Pasar Kerja (Eselon IV A)
- c. Bidang Hubungan Industrial (Eselon III B)
 - Seksi Hubungan Industrial (Eselon IV A)
 - Seksi Kesejahteraan Pekerja (Eselon IV A)
 - Seksi Persyaratan kerja dan perselisihan Hubungan Industrial (Eselon IV A)

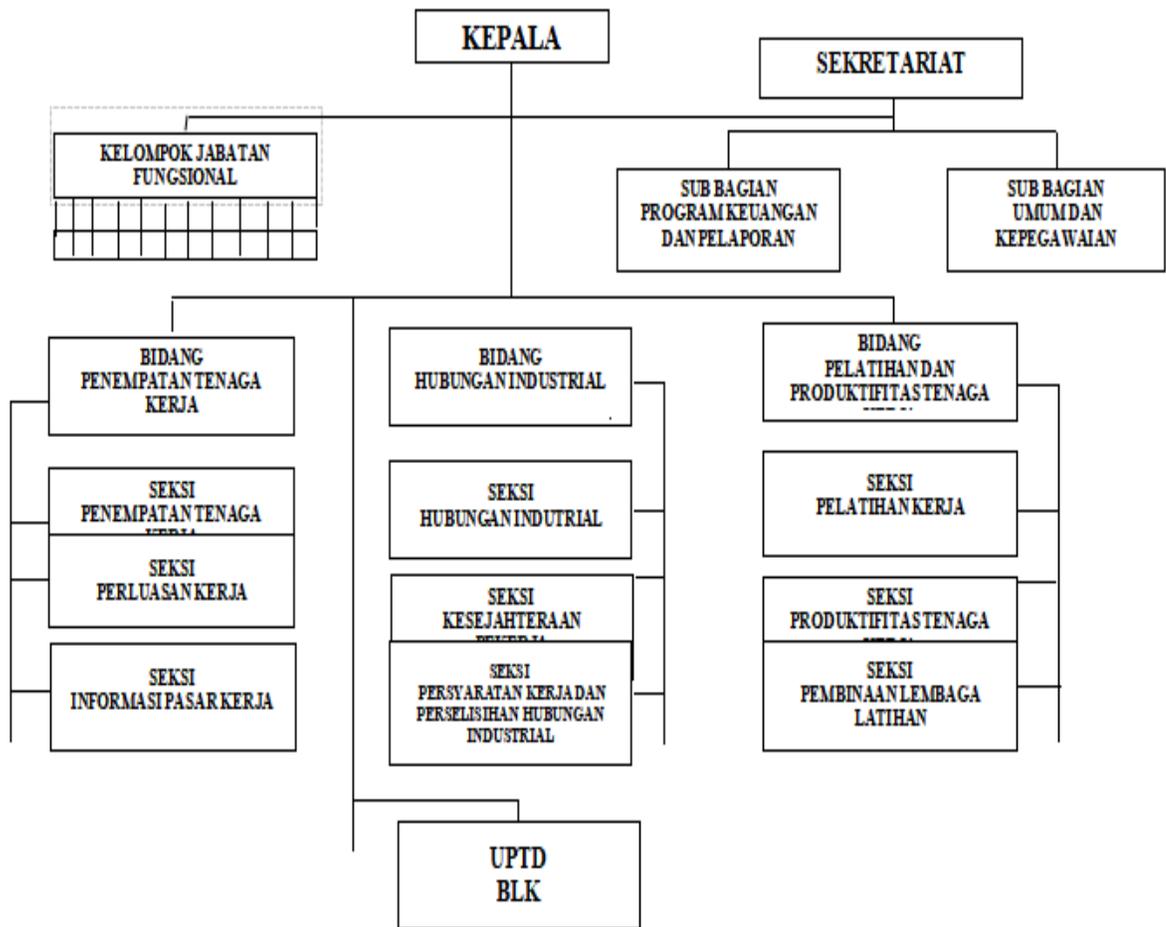
- d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja (Eselon III B)
- Seksi Pelatihan Kerja (Eselon IV A);
 - Seksi Produktivitas Tenaga Kerja (Eselon IV A); dan
 - Seksi Pembinaan Lembaga Latihan (Eselon IV A).
- f. UPT Dinas Tenaga Kerja Balai Latihan Kerja(BLK)(Eselon IV B)
- Kelompok Jabatan fungsional
 - Unsur Pelaksana

- **Struktur Organisasi**
- **Personil**

Jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa pada Tahun 2024 berjumlah 16 Orang yang terdiri dari Pegawai Negeri (PNS).

GOLONGAN	A	B	C	D	E	JLH
GOL IV	-	2	-	-	-	2
GOL III	-	1	3	8	-	12
GOL II	-	-	-	-	-	-
GOL I	-	-	-	-	-	-
STRUKTURAL						14
PELAKSANA / STAF						-

**STRUKTUR ORGANISASIDINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MINAHASA**



SUMBER DAYA

1. Adapun Sumber Daya Manusia yang mendukung Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa berjumlah 16 pegawai, yang terdiri dari :

2. Pejabat Struktural

- a. Eselon II : 1 Orang
- b. Eselon III : 4 Orang
- c. Eselon IV : 9 Orang
- J u m l a h** : 14 Orang

3. Pendidikan

- a. S3 : - Orang
- b. Pasca Sarjana (S2) : 1 Orang
- c. Sarjana (S1) : 13 Orang
- d. Sarjana Muda/Akademi/DIII : - Orang

e. S L T A	: - Orang
f. S L T P	: - Orang
g. SD	: <u>- Orang</u>

J u m l a h : 14 Orang

4. Kepangkatan

a. Golongan IV	: 2 Orang
b. Golongan III	: 13 Orang
c. Golongan II	: - Orang
d. Golongan I	: <u>- Orang</u>

J u m l a h : 14 Orang

Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa berdasarkan pendidikan dan kepangkatan tersebar pada 5 (Lima) unit kerja, yakni :

1. Sekretariat	: 3 Orang
2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja	: 3 Orang
3. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dan Kesejahteraan Pekerja	: 3 Orang
4. Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	: 2 Orang
5. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK)	: 1 Orang

J u m l a h : 13 Orang

Kondisi Pegawai menurut jenjang pendidikan struktural pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa, yakni :

Pim II	: 1 Orang
Pim III	: 2 Orang
Pim IV	: 2 Orang

Kondisi Pegawai menurut jenjang pendidikan Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa, yakni :

Diklat Instruktur	: - Orang
-------------------	-----------

Diklat Mediator : - Orang

Sarana dan Prasarana

Kondisi sumber daya Sarana dan Prasarana juga sangat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi sehingga optimalisasi tugas dan fungsi dapat dicapai. Kondisi Sarana dan Prasarana yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa :

TAHUN	U R A I A N	VOLUME	KET.
2024	I. Bangunan		
	a. Gedung Kantor	1 Unit	Cukup
	b. Aula	1 Unit	Cukup
	c. Balai Latihan Tenaga Kerja	3 Unit	Cukup
	d. Rumah Dinas :		
	- Rumah Kepala	1 Unit	Rusak Ringan
	- Kopel	4 Unit	Cukup Rusak Berat
	- Non Kopel	6 Unit	Cukup Rusak Berat
	II. Kendaraan		
	a. Roda 4 (empat)	1 Unit	Kurang
	III. Peralatan		
	a. AC	-	Kurang
	b. Komputer	2 Unit	Kurang
	c. TV	1 Unit	Kurang
	d. Faximile	-	Kurang
	e. Laptop	5 Unit	Kurang
	f. Pompa air	1 Unit	Kurang

1.4 Isu Strategis berpengaruh

Isu dan Masalah strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2024 adalah :

1. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur.
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana.
3. Terbatasnya Anggaran karena Refocusing anggaran
4. Kemampuan SDM pencari kerja tahun 2024 relatif rendah.
5. Jumlah penduduk miskin yang relatif besar

6. Pencari kerja masih memilih-milih lapangan pekerjaan pada sektor formal.
7. Porsi penduduk berusia lanjut yang bertambah akan mengurangi jumlah tenaga kerja produktif.
8. Angka pengangguran masih relatif tinggi
9. Variasi lapangan kerja yang tersedia masih terbatas penduduk bekerja di sektor pertanian
10. Kontribusi perempuan dalam bursa tenaga kerja yang sangat jauh dibandingkan dengan laki-laki
11. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Minahasa relative tinggi
12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan semangat kewirausahaan masih kurang.
13. Belum semua perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh lebih dari 50 orang membentuk LKS Bipartit, sementara LKS Bipartit yang ada belum berfungsi dengan baik.
14. Belum semua perusahaan mewajibkan pekerjanya mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan.
15. Perusahaan yang tidak memperhatikan hak-hak buruh masih ada.
16. Adanya Pemutusan Hubungan Kerja.
17. Perselisihan Hubungan Industrial masih relatif tinggi.
18. Data ketenagakerjaan yang disampaikan dari perusahaan kurang akurat dan bahkan ada yang tidak menyampaikan.

1.5 Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah :

1. Tap MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemertintahan Daerah
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor:126,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor:4438)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 62 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 Nomor 2.01.01.01.00.00

1.6. Sistematika Penyajian

Sistem penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LjKIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa yaitu :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menyajikan Ringkasan kinerja, kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah.

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I meliputi latar belakang, Bidang Kewenangan dan Perangkat Daerah, Isu strategis yang paling berpengaruh dasar hukum dan sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada Bab II meliputi rencana strategis yang berisi ringkasan Renstra yaitu Visi, Misi, tujuan, Sasaran, kebijakan dan program serta perjanjian kinerja yang menyangkut rencana pencapaian target indikator sasaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab III meliputi hasil pencapaian sasaran-sasaran Dinas Tenaga Kerja dan hasil pengukuran kinerja kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab IV meliputi Kesimpulan, Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja, Kendala dan Hambatan serta Strategi pemecahan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Penetapan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan pelaksanaannya.

Dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik local, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelraskan Visi dan Misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa memberikan pedoman dalam melaksanakan pembangunan bidang ketenagakerjaan selama kurun waktu 2024-2026.

2.1.1. Tujuan Dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dan merupakan implementasi dari Misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasara, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan Misi dan untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa telah menetapkan Tujuan sebagai berikut:

TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan adalah:

1. Meningkatkan penanganan masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial

2. Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa dalam jangka waktu 5 tahun yang terbagi dalam kurun waktu tahunan sesuai penentuan APBD.

Dari sasaran inilah LjKIP mulai dapat diukur karena sasaran sebagai dasar untuk mengendalikan dan mengukur kinerja Organisasi. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja kabupaten Minahasa, yaitu :

1. Menurunnya Tingkat Pengangguran
2. Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja
3. Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang bersih, Akuntabel dan Profesional

KEBIJAKAN

Kebijakan untuk melaksanakan visi dan misi dalam upaya pencapaian sasaran strategis adalah :

1. Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
2. Rehabilitasi sedang/berat Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja
3. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja
4. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
5. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
6. Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang KetenagaKerjaan
7. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Proses Administrasi Kepegawaian
8. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Surat Menyurat , Tata Naskah dan Kearsipan
9. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Asset
10. Nilai IKM Perangkat Daerah

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja atau penetapan kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara

atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	94 %
		Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja	81.5 %
		Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	82 %
2	Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	53 %
3	Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang bersih, Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi	B

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	5.450.400	
2	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	979.997.757	
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	0	
4	Program Hubungan Industrial	3.884.715.500	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.029.169.094 R	
	TOTAL ANGGARAN	6.899.332.751	

Perjanjian kinerja memuat pernyataan yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja beserta target tenaga kerja dan anggaran.

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana dimaksud pada Perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2024, maka perlu mendapat dukungan anggaran seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

PROGRAM ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2024

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024		KE T				
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2024		APBD 2024	PERUBAHAN 2024		
					1	2	3	4	5		6	7	8	
							K	Rp	K	Rp				
2	URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA													
2 0 7	TENAGA KERJA				5.785.289.800,00	6.815.034.445,00		6.899.332.751,00		6.601.826.129,00				
2 0 7 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai IKM Perangkat daerah	Nilai IKM Perangkat daerah	2.263.121.150	2.211.886.288	4	2.029.169.094	4	1.908.465.193,00				

2	0	0	2	0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.750.000	456.540	90	456.540	90	0
2	0	0	2	0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Rancangan Renja yang tersusun	Jumlah Rancangan Renja yang tersusun	1.506.660	456.540	2	456.540	2	0
								Jumlah Rancangan Perubahan Renstra yang tersusun	Jumlah Rancangan Perubahan Renstra yang tersusun	0	0	0	0	0	0
2	0	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Rancangan Renja yang tersusun	Jumlah Rancangan Renja yang tersusun	907.500	0	1	0	1	0
2	0	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	497.250	0	1	0	1	0
2	0	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	347,250	0	1	0	1	0

2	0	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	497,250	0	1	0	1	0				
2	0	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	497.250	0	1	0	1	0				

2	0	0	2	0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	497.250	0	1	0	1	0
2	0	0	2	0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai/ASN yang mendapatkan Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase pegawai/ASN yang mendapatkan Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1.986.769.000	2.031.782.508	100	2.031.782.508	100	1.745.288.693
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.986.769.000	2.031.782.508	100	2.031.782.508	100	1.745.288.693
2	0	0	2	0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja	Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja	12.850.000	-	95	-	95	
2	0	0	2	0	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2.850.000	0	1	0	1	0

2	0	0	2	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10.000.000	0	20	0	20	0
2	0	0	2	0	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi	Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi	85.529.640	33.921.140	95	33.921.140	95	5.396.250
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21.998.000	17.459.190	2	3.809.076	2	3.656.250
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.529.640	467.950	1	467.950	-	0
2	0	0	2	0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	0	0		0	
2	0	0	2	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.002.000	15.994.000	30	15.994.000	30	1.740.000

2	0	0	2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan BMD Penunjang yang diadakan (sesuaikan jenis yang diadakan)	Persentase pemenuhan Kebutuhan BMD Penunjang yang diadakan (sesuaikan jenis yang diadakan)			95 %	14.983.890	90	0
2	0	0	2	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1	14.983.890	1	0
2	0	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Operasionalisasi Perkantoran Tahunan	Persentase Tingkat Operasionalisasi Perkantoran Tahunan	143.222.100	118.726.100	95	138.526.100	95	130.791.900
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	1	500.000	1-	500.000
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25.226.100	25.226.100	12	25.226.100	12	20.291.900

2	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.696.000	0	1	0	1	0
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	112.800.000	93.000.000	12	112.800.000	12	110.000.000
2	0	0	2	0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/ laik fungsi	Persentase BMD dalam kondisi baik/ laik fungsi	30.000.000	27.000.000	95	27.000.000	95	26.988.350
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Per Organ Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Per Organ Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	30.000.000	27.000.000	1	27.000.000	1	26.988.350

2	0	0	2	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (sesuaikan jenis nama peralatan/mesin yang dipelihara)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (sesuaikan jenis nama peralatan/mesin yang dipelihara)	0	0	0	0	0		
2	0	0	2	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/diRehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/diRehabilitasi	150.000.000	0	0	0	0		
2	0	0	2	0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Sarana Pendukung Yang di Pelihara dan Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Sarana Pendukung Yang di Pelihara dan Direhabilitasi	150.000.000	0	0	0	0		
0	0					PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja	11.025.600	5.450.400	94	5.450.400	94	4.220.625	
0	0	2	0			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja	11.025.600	5.450.400	2	5.450.400	2	4.220.625	
0	0	2	0	0		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	5.528.000	5.450.400	1	5.450.400	1	4.220.625	
0	0	2	0	0		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja	5.497.600	0	5	0	5	0	

									(RTK) Mikro	(RTK) Mikro								
2	0	0							PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Angkatan Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja	Jumlah Angkatan Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja	249.926.300	979.997.757	81	979.997.757	81	889.240.440
2	0	0	2	0					Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	249.926.300	979.997.757	8	979.997.757	8	889.240.440
2	0	0	2	0	0				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	249.926.300	979.997.757	8	979.997.757	8	889.240.440
2	0	0	2	0	0	3			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	109.990.000	0	10	0	10	0
2	0	0							PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Pencari Kerja Yang Berhasil Ditempatkan	Jumlah Pencari Kerja Yang Berhasil Ditempatkan	229.235.850	0	82	0-	82	-

2	0	0	2	0		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jalan yang dibangun sebagai penunjang kegiatan ekonomi masyarakat	Tersedianya Jalan yang dibangun sebagai penunjang kegiatan ekonomi masyarakat	186.536.000	0	200	0	200	0
2	0	0	2	0	0	Pelayanan antar Kerja	Pelayanan antar Kerja	umlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	umlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	186.536.000	0	180	0	180	0
2	0	0	2	0		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyalur Tenaga Kerja yang melaksanakan aturan tentang penempatan tenaga kerja	Tersedianya Penyalur Tenaga Kerja yang melaksanakan aturan tentang penempatan tenaga kerja	0	0	0	0	0	
2	0	0	2	0	0	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah Penyalur Tenaga Kerja yang melaksanakan aturan tentang penempatan tenaga kerja	Jumlah Penyalur Tenaga Kerja yang melaksanakan aturan tentang penempatan tenaga kerja	0	0	0	0	0	
2	0	0	2	0		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan kesempatan	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan kesempatan	42.699.850	0	200-	0	200	0

2	0	0	2	0	0	Job Fair/Bursa Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	42.699.850	0	200	0	200	0				
2	0	0				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Terselenggara nya pendataan dan Informasi HI	Terselenggara nya pendataan dan Informasi HI	3.031.980.900	3.617.700.000	53	3.884.715.500	53	3.799.899.871				
2	0	0	2	0		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.988.300	0	20	0	20	0				
2	0	0	2	0	0	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan	2.988.300	0	20	0	20	0				

							Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan							
2	0	0	2	0		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Tesedianya Perusahaan yang baik yang mengikuti aturan	Tesedianya Perusahaan yang baik yang mengikuti aturan	3.028.992.600	3.617.700.000	1 Tahun	3.884.715.500	1 Tahun	3.799.899.871
2	0	0	2	0	0	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4.992.600	0	10	0	10	0
						Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas	3.024.000.000	3.617.700.000	1	3.884.715.500	1	3.799.899.871

						Pekerja	Pekerja	Kesejahteraan Pekerja	Kesejahteraan Pekerja									
--	--	--	--	--	--	---------	---------	--------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa yang diukur melalui 6 program, 12 kegiatan menunjukkan capaian kinerja akhir yang secara umum baik.

3.1 ANALISA CAPAIAN KINERJA

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasatelah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa dengan Bupati Minahasa tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2019	CAPAIAN 2023	TAHUN 2024				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Indikator: Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Meta Indikator: Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi padatahun	Orang	80	32	200	192	96	Sangat baik	600

Lkjp Dinas Tenaga Kerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/METAIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2019	CAPAIAN 2023	TAHUN 2024				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja	<u>Indikator:</u> Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kab/kota <u>Meta Indikator:</u> Jumlah kesempatan kerja tahun n	Orang	1.000	2.196	2000	1.486	74.3	Sedang	6.000
3	Meningkatkan Perencanaan Tenaga Kerja	<u>Indikator:</u> Persentase Kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke RTK <u>Meta Indikator:</u> Jumlah Dokumen RTK Tahun n	Buah	1	0	1	1	100	Sangat Baik	1
4	Meningkatkan Hubungan Industrial	<u>Indikator:</u> Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan <u>Meta Indikator:</u> Jumlah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan tahun n	Orang	15.000	19.640	20.268	20.199	99.65	Sangat Baik	20.500
5	Meningkatkan penunjang unsur tenaga kerja terhadap kepuasan stake holder	<u>Indikator:</u> Kepuasan stake holder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah <u>Meta Indikator:</u> Nilai Sakip Tahun n	Angka	B	CC	B	B	0	Sedang	B

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1: Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Tolak ukur capaian sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka diukur dengan dua indikator. Indikator tersebut yaitu indikator :

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja
2. Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja
3. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja

penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut

Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	2	3	4
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana Tenaga Kerja

		Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
		Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota

Kinerja sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dengan indikator Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian 2023 terhadap target 2024 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana Tenaga Kerja	0	1	1	100 %	1	100 %

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Rancangan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah yang tersusun sebanyak 1 Dokumen dengan demikian presentase realisasi terhadap target sebesar 100 % (tercapai).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu capaiannya meningkat.
- c. Capaian target indikator pada tahun 2024 mencerminkan capaian tahun awal Renstra periode 2024-2026.

Hambatan terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja ini adalah tidak adanya dukungan anggaran yang memadai serta keterbatasan SDM untuk Pelaksanaan penyusunan Dokumen RTKD dimaksud karena tidak ada pelatihan.

Kinerja sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dengan indikator Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III. 5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian 2024 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8

Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	32	200	192	96 %	600	32 %
---	----	-----	-----	------	-----	------

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- d. Jumlah Peserta Pelatihan sebanyak 192 orang dengan demikian presentase realisasi terhadap target sebesar 96 % (belum tercapai).
- e. Dibandingkan realisasi tahun lalu capaiannya meningkat.
- f. Capaian target indikator pada tahun 2024 mencerminkan capaian awal Renstra periode 2014-2026.

Kegagalan capaian Indikator Prosentase tersebut disebabkan oleh :

- a. Keterbatasan Anggaran Pelatihan Berbasis Kompetensi yang dianggarkan lewat APBD Kabupaten Minahasa pada Tahun 2024.
- b. Jumlah Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang didanai APBN lewat BPVP Ternate hanya 3 Kegiatan

Hambatan terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator Jumlah Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi ini adalah tidak adanya instruktur berstatus PNS di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa sehingga harus menggunakan instruktur dari luar instansi serta Keterbatasan Sarana prasarana pelatihan. (Tidak ada dan dalam keadaan rusak)

Kinerja sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dengan indikator Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III. 6 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian 2024 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	2.196	2.000	1.486	74.3 %	6.000	24.4 %

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Tenaga Kerja yang mendaftar/membuat Kartu Pencari Kerja/AK1 sebanyak 1486 Orang dengan demikian presentase realisasi terhadap target sebesar 74.3 % (belum tercapai).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu capaiannya menurun.
- c. Capaian target indikator pada tahun 2024 mencerminkan capaian awal Renstra periode 2014-2026.

Kegagalan capaian Indikator Prosentase tersebut disebabkan oleh :

- a. Keterbatasan Lowongan Pekerjaan dan informasi lowongan pekerjaan di Tahun 2024.
- b. Tidak diselenggarakannya Kegiatan Bursa Kerja/Job Fair karena ketiadaan anggaran.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja ini adalah Rendahnya kualitas angkatan kerja dan ketidaksesuaian antara pendidikan dengan pekerjaan (*link and match*) serta ketiadaan anggaran di Bidang Penempatan Tenaga Kerja.

Sasaran 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja

Tolak ukur capaian sasaran **Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja** diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu indikator : Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III. 7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)

Kinerja sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja dengan indikator Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III. 8 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian 2024 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	19.640 Orang	20.268 Orang	20.199 Orang	99.65	50	98.53 %

Analisis Ketercapaian Sasaran 2 : Terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja adalah sebagai berikut:

- Tercapai 20.199 Orang, dengan demikian presentase realisasi terhadap target sebesar 99.65 hampir memenuhi target.
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 19.640 Orang terdapat kenaikan sebanyak 559 Orang.
- Capaian target indikator pada tahun 2022 mencerminkan capaian tahun akhir RPJMD periode 2017-2022.

Keberhasilan capaian Indikator Prosentase peningkatan capaian tersebut didukung dari:

- Peningkatan anggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan lewat Program Pesona
- Peningkatan kualitas Mediator Hubungan Industrial

Capaian realisasi indikator pada sasaran terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja yaitu jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial pada tahun 2024 ini sebanyak 8 Kasus sehingga masuk kategori hijau tua atau sangat baik.

Berdasarkan dokumen Renstra TA 2017-2022 Dinas Tenaga Kerja, indikator jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 10 kasus dan bisa terealisasi sebanyak 8 kasus.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja ini adalah :

1. Masih ada perselisihan hubungan industrial yang belum bisa diselesaikan secara Bipartit, sehingga harus dicatatkan ke Disnakertrans untuk mendapatkan penyelesaian melalui mediasi.

Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pembinaan agar kapasitas lembaga Bipartit dapat berkontribusi lebih banyak dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi di perusahaan.

2. Masih banyak pekerja rentan yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan

Solusi yang bisa dilakukan dengan melibatkan seluruh ASN dengan program ASN Peduli

Untuk melaksanakan program kegiatan sangat dipengaruhi oleh faktor kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan ancaman (threats), sehingga dengan mencermati lingkungan internal organisasi yang menghasilkan kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness)

a. Kekuatan (strength)

1. Adanya program dan rencana kerja yang cukup terintegrasi
2. Adanya aparatur yang cukup berkualitas
3. Susunan organisasi dan tata kerja yang terstruktur dengan baik
4. Dukungan kepemimpinan yang mempunyai visi dan misi yang jelas tentang penyelenggaraan dan fungsi kelembagaan

b. Kelemahan (weakness)

1. Jumlah aparatur yang profesional dan berkualitas masih terbatas
2. Sarana dan prasarana fasilitas penunjang kelancaran tugas masih terbatas
3. Dana/anggaran operational masih terbatas
4. Masih ada jabatan struktural yang belum terisi
5. Masih kurangnya disiplin dan motivasi kerja aparatur

Disamping mencermati lingkungan internal, maka senantiasa perlu saat yang sama mencermati lingkungan eksternal dengan menghasilkan

a. Peluang (*opportunities*)

1. Adanya Perda NO. 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa serta Peraturan Bupati Minahasa NO. 62 tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas tenaga kerja Kabupaten Minahasa.
2. Adanya undang-undang No. 32 tahun 2004
3. Adanya kesempatan mengikuti Diklat Struktural maupun Teknis Fungsional sesuai PP. NO. 101 tahun 2003 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS
4. Semakin berkembangnya kelembagaan masyarakat ditingkat kecamatan, kelurahan dan desa
5. Semakin berkembangnya sistem pemerintahan yang ditunjang kemitraan antara penyelenggara pemerintahan dengan stakeholders

b. Ancaman (*threats*)

1. Terjadinya krisis multi dimensi ditengah masyarakat
2. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas dari Pemerintah Daerah
3. Masih rendahnya kesadaran, partisipasi dan pengetahuan masyarakat dalam mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat
4. Koordinasi dan kerjasama seluruh pihak terkait (stakeholders) belum efektif
5. Adanya era globalisasi dan informasi serta perkembangan IPTEK.

c. Strategi kedepan

1. Mendayagunakan aparatur yang cukup berkualitas untuk :
 - mendukung kinerja organisasi
 - memberdayakan masyarakat dan perusahaan
 - membangun koordinasi dan kerjasama yang baik dan harmonis dengan seluruh stakeholders
2. Mendayagunakan program dan rencana secara optimal untuk
 - Pengembangan kinerja aparatur
 - Memberdayakan peran serta lembaga masyarakat dalam mendukung optimalisasi proses pemberdayaan masyarakat dan perusahaan

- Menciptakan koordinasi dan kerja sama yang baik dan harmonis dengan seluruh stakeholders.
- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan perusahaan dalam berbagai program dan kegiatan.

Capaian Kinerja masing-masing kegiatan berdasarkan indikator input, output dan outcome sebagaimana dapat dilihat pada formulir pengukuran kinerja kegiatan (lampiran 3) yang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penyusunan Rencana Tenaga Kerja.

Kegiatan Penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Minhasa Tahun 2024 s/d 2028 dengan target 1 Dokumen terealisasi 100% terdiri dari :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan target 200 orang terealisasi sebanyak 192 orang atau 96 %.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerj	200 orang	192 orang	96

3. Program Penempatan Tenaga Kerja

Kegiatan penempatan tenaga kerja dengan target 2.000 orang terealisasi sebanyak 74.3 % atau 1.486 orang.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	2.000 orang	1.486 orang	74.3

4. Program Hubungan Industrial

Kegiatan Jaminan Perlindungan social ketenagakerjaan dengan target 20.268 orang terealisasi sebanyak 20.199 orang atau 99.65 %.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerj	20.268 Orang	20.199 Orang	99.65

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam program tersebut ditargetkan Nilai B dan realisasi B

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerj	B	B	

3.2 EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan pengukuran Kinerja tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (Lampiran 4), maka pencapaian indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Program Pelatihan dan produktivitas tenaga kerja yang dijabarkan dalam 1(satu) kegiatan dengan nilai capaian indikator kegiatan 99.65 %,

Berdasarkan pengukuran kinerja, menunjukkan capaian kinerja akhir menunjukkan bahwa dari 12 kegiatan capaian akhir indikator kinerja adalah sebesar 92,48%, hasil ini menunjukkan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa baik.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2024 Rp. 6.899.332.751

Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2024 Rp. – 6.601.826.129 atau terealisasi 95.69 % dengan Rincian Anggaran selama tahun 2024 sebagai berikut :

Lkjp Dinas Tenaga Kerja

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024		SISA / SELISIH	RASIO	
		Rp	Rp	K	Rp	K	Rp		Rp	ANGGARAN
									%	%
URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA										
TENAGA KERJA		5.785.289.800,00	6.815.034.445,00		6.899.332.751,00		6.601.826.129,00	297.506.622,00	95,69	95,69
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai IKM Perangkat daerah	2.263.121.150	2.211.886.288	4 IKM	2.029.169.094	4 IKM	1.908.465.193,00	120.703.901,00	94,05	94,05
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.750.000	456.540	90%	456.540	90%	0	456.540,00	0,00	0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Rancangan Renja yang tersusun	1.506.660	456.540	2 Dok	456.540	2 Dok	0	456.540,00	0,00	0,00
	Jumlah Rancangan Perubahan Renstra yang tersusun	0	0	0	0	0	0	0,00		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Rancangan Renja yang tersusun	907.500	0	1	0	1	0	0,00		

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	497.250	0	1	0	1	0	0,00		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	347,25	0	1	0	1	0	0,00		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	497,25	0	1	0	1	0	0,00		
Koordinasi dan Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	497.250	0	1	0	1	0	0,00		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	497.250	0	1	0	1	0	0,00		

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai/ASN yang mendapatkan Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1.986.769.000	2.031.782.508	100	2.031.782.508	100	1.745.288.693	286.493.815,00	85,90	85,90
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.986.769.000	2.031.782.508	100	2.031.782.508	100	1.745.288.693	286.493.815,00	85,90	85,90
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja	12.850.000	0	95	0	95	0	0,00		0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2.850.000	0	1	0	1	0	0,00		0,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10.000.000	0	20	0	20	0	0,00		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi	85.529.640	33.921.140	95	33.921.140	95	5.396.250	28.524.890,00	15,91	15,91
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21.998.000	17.459.190	2	3.809.076	2	3.656.250	152.826,00	95,99	95,99
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.529.640	467.950	1	467.950	-	0	467.950,00	0,00	0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	0	0		0		0,00		0,00

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.002.000	15.994.000	30	15.994.000	30	1.740,00	15.992.260,00	0,01	0,01
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan									
	BMD Penunjang yang diadakan (sesuaikan jenis yang diadakan)			95%	14.983.890	90	0	14.983.890,00	0,00	0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1	14.983.890	1	0	14.983.890,00	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Operasionalisasi Perkantoran Tahunan	143.222.100	118.726.100	95	138.526.100	95	130.791.900	7.734.200,00	94,42	94,42
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	1	500.000	1-	500.000	0,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25.226.100	25.226.100	12	25.226.100	12	20.291.900	4.934.200,00	80,44	80,44
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.696.000	0	1	0	1	0	0,00		0,00

[LKJIP DINAS TENAGA KERJA] 2024

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	112.800.000	93.000.000	1 2	112.800.000	12	110.000.000	2.800.000,00	97,52	97,52
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/ laik fungsi	30.000.000	27.000.000	95	27.000.000	95	26.988.350	11.650,00	99,96	99,96
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Per Organ Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	30.000.000	27.000.000	1	27.000.000	1	26.988.350	11.650,00	99,96	99,96
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (sesuaikan jenis nama peralatan/mesin yang dipelihara)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ diRehabilitasi	150.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Sarana Pendukung Yang di Pelihara dan Direhabilitasi	150.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja	11.025.600	5.450.400	94	5.450.400	94	4.220.625	1.229.775,00	77,44	77,44
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja	11.025.600	5.450.400	2	5.450.400	2	4.220.625	1.229.775,00	77,44	77,44
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	5.528.000	5.450.400	1	5.450.400	1	4.220.625	1.229.775,00	77,44	77,44
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro	5.497.600	0	5	0	5	0	0,00		0,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Angkatan Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja	249.926.300	979.997.757	81	979.997.757	81	889.240.440	90.757.317,00	90,74	90,74
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	249.926.300	979.997.757	8	979.997.757	8	889.240.440	90.757.317,00	90,74	90,74

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	249.926.300	979.997.757	8	979.997.757	8	889.240.440	90.757.317,00	90,74	90,74
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	109.990.000	0	10	0	10	0	0,00	0,00	0
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Pencari Kerja Yang Berhasil Ditempatkan	229.235.850	0	82	0-	82	-	0,00	0,00	0
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jalan yang dibangun sebagai penunjang kegiatan ekonomi masyarakat	186.536.000	0	200	0	200	0	0,00	0,00	0
Pelayanan antar Kerja	umlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	186.536.000	0	180	0	180	0	0,00	0,00	0
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyalur Tenaga Kerja yang melaksanakan aturan tentang penempatan tenaga kerja	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah Penyalur Tenaga Kerja yang melaksanakan aturan tentang penempatan tenaga kerja	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan kesempatan kerja	42.699.850	0	200-	0	200	0	0,00	0,00	0
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	42.699.850	0	200	0	200	0	0,00	0,00	0
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Terselenggaranya pendataan dan Informasi HI	3.031.980.900	3.617.700.000	53	3.884.715.500	53	3.799.899.871	84.815.629,00	97,82	97,82
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2.988.300	0	20	0	20	0	0,00	0,00	0
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2.988.300	0	20	0	20	0	0,00	0,00	0

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Tesedianya Perusahaan yang baik yang mengikuti aturan	3.028.992.600	3.617.700.000	1 Tahun	3.884.715.500	1 Tahun	3.799.899.871	84.815.629,00	97,82	97,82
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4.992.600	0	10	0	10	0	0,00	0	0
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3.024.000.000	3.617.700.000	1	3.884.715.500	1	3.799.899.871	84.815.629,00	97,82	97,82

BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2024 dimaksudkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan serta program . Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai tindak lanjut keputusan Presiden RI nomor 7 Tahun 1999. Laporan ini menggambarkan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa antara lain :

1. Penempatan Profesionalisme dan Kinerja Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Ketenagakerjaan;
2. Peingkatan Perencanaan Tenaga Kerja dengan tersedianya Rancangan Awal Dokumen Rencana Tenaga Kerja untuk Pemerintahan yang baru periode 2025 s/d 2029.
3. Peningkatan penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan terserapnya pengangguran di Kabupaten Minahasa;
4. Terwujudnya pengembangan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan untuk terciptanya kesejahteraan tenaga kerja dan kemajuan dunia usaha;
5. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan Tenaga Kerja melalui pengawasan dan peningkatan Hukum Ketenagakerjaan dan perlindungan hak-hak pekerja melalui pengawasan pelaksanaan pengupahan dan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
6. Peningkatan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan serta peningkatan sistem manajemen ketenagakerjaan;
7. Meningkatnya sarana, prasarana, kualitas dan kuantitas aparatur yang profesional. Misalnya terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah, pelatihan dan peningkatan SDM serta tersedianya perlalatan dan perlengkapan gedung kantor;
8. Meningkatnya kesiapan Tenaga Kerja sesuai bursa kerja yang diminati dan mendorong pengusaha untuk meningkatkan mutu/ Kualitas Tenaga Kerja.

Adapun Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa dapat di kategorikan berhasil.

Demikianlah penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa, dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Selanjutnya Laporan Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali, penilai kualitas dan pendorong terwujudnya “*good governance*”, terutama dalam pelaksanaan program di bidang ketenagakerjaan Tahun 2024.

Dengan Laporan Kinerja ini, maka aktivitas ketenagakerjaan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik, sekaligus sebagai pedoman untuk mengevaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa sesuai dengan RENSTRA 2024 – 2026.

Tondano, Januari 2025

**KEPALA DINAS TENAGA
KERJA KABUPATEN MIAHAHASA,**



DRS JORIS TUMILANTOUW
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19681129 199101 1 001